



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 906 /SEK/OT.01.1/6/2020

Jakarta, 5 Juni 2020

Sifat : Segera

Perihal : Perpanjangan Survei Implementasi Budaya
Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Kepada Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia
8. Para Kepala Biro pada Badan Urusan Administrasi
9. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Nomor 867/SEK/OT.01.1/5/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Survei Implementasi Budaya Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, setelah dilakukan evaluasi terhadap responden, partisipasi Hakim dan aparatur peradilan masih sangat rendah.

Oleh maka itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM **seluruh aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya** diwajibkan berpartisipasi mengisi survey tersebut melalui *link*: **bit.ly/surveibudayakerja_mari** sampai dengan **tanggal 11 Juni 2020**. Partisipasi dalam survei tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan proses penentuan/rekomendasi satker untuk dapat diusulkan dalam penilaian PMPZI menuju WBK/WBBM kepada Kemenpan RB tahun 2020.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung

A.S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.